

**ARSITEKTUR ENTERPRISE SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK (SPBE)
PADA DOMAIN DATA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN**

***ENTERPRISE ARCHITECTURE OF ELECTRONIC-BASED GOVERNANCE
SYSTEM IN DATA DOMAIN IN THE REGIONAL GOVERNMENT OF
KUNINGAN REGENCY***

Ikhwan Hadi¹, Soni Fajar Surya Gumilang², Ryan Adhitya Nugraha³

^{1,2,3} Universitas Telkom, Bandung

¹ikhwanhadi@telkomuniversity.ac.id, ²mustonie@telkomuniversity.ac.id,

³ranugraha@telkomuniversity.ac.id

Abstrak

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada masa sekarang tentunya menjadi sebuah keharusan baik untuk keperluan sebuah perusahaan atau pada pemerintahan sekalipun. Hal ini menjadikan Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 mengenai penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau biasa disebut E-Government untuk peningkatan pelayanan publik agar menjadi berkualitas dan terpercaya yang dilakukan pada tingkat nasional, instansi pusat, dan pemerintah daerah. Pada tingkat pemerintah daerah salah satu pemerintah daerah yang sudah menerapkan SPBE di Indonesia adalah Pemerintahan Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Tetapi jika dilihat tingkat kematangan SPBE pada Kabupaten Kuningan menurut nilai indeks SPBE nasional, Kabupaten Kuningan masih berada pada kategori cukup. Oleh karena itu masih relevan jika penulis memilih metodologi perancangan Arsitektur Enterprise pada domain arsitektur data menggunakan best practice DAMA DMBOK dan melakukan analisis sentimen pada website resmi dan media sosial utama pemerintah Kabupaten Kuningan. Penelitian ini akan menghasilkan rancangan Arsitektur Data dan Manajemen Data Pemerintah Kabupaten Kuningan.

Kata kunci: *E-Government, Enterprise Architecture, SPBE, DAMA DMBOK*

Abstract

The use of Information and Communication Technology (ICT) today is certainly a necessary for both company or government. This has made Indonesia release Presidential Regulation Number 95 of 2018 concerning about the use of Electronic Based Government System (SPBE) or commonly known as E-Government to improve public services for a better quality and reliable which is carried out at the national level, central agencies and local governments. At the regional government level, one of the local governments that has implemented SPBE in Indonesia is Kuningan Regency Government, West Java. But if we look at the level of maturity of the SPBE in Kuningan Regency according to the national SPBE index value, Kuningan Regency is still in the sufficient category. Therefore, it is still relevant if the author chooses the architectural design methodology in the data architecture domain using DAMA DMBOK best practices and conducts sentiment analysis on the official website and main social media of the Kuningan Regency government. This research will produce Data Design and Data Management of Kuningan Regency Government.

Keywords: *E-Government, Enterprise Architecture, SPBE, DAMA DMBOK*

1. Pendahuluan

Penerapan Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau lebih umum dikenal sebagai *E-Government*. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, SPBE merupakan sebuah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berguna untuk memberikan layanan terbaik kepada penggunanya. SPBE sendiri ditujukan untuk mewujudkan sebuah tata kelola pada pemerintahan dan menjadikan pemerintahan yang bersih, transparan, efektif, dan juga akuntabel. SPBE juga berguna untuk meningkatkan pelayanan publik yang terpercaya dan berkualitas, meningkatkan kolaborasi instansi pemerintah yang satu dengan yang lainnya dalam melaksanakan tugas-tugasnya untuk mencapai tujuan bersama, serta untuk meminimalisir penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk apapun dengan menerapkan sistem pengawasan (Bouty dkk., 2019).

Arsitektur SPBE memuat banyak integrasi. Namun dalam penelitian ini arsitektur yang akan digunakan Domain Data. Domain data yaitu pengintegrasian data pada penyelenggaraan pemerintahan yang telah didukung oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia, dengan adanya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang selanjutnya didukung oleh peraturan pemerintah diharapkan memudahkan pembuatan, pengelolaan, dan pengaksesan data pada penyelenggaraan pemerintahan. Dimana salah satu daerah yang menerapkannya yaitu Pemerintah Kabupaten Kuningan.

Perkembangan kondisi SPBE Indonesia sangatlah rendah dibandingkan negara ASEAN lainnya. Dengan adanya fakta tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 yang membahas tentang pelaksanaan SPBE yang merupakan bentuk dari sistem *E-Government* yang selama ini diterapkan (Taqiya dkk., 2020), langkah tersebut diyakini menjadikan Indonesia mengalami Kenaikan Peringkat menjadi lebih baik. Berikut tabel nilai indeks SPBE:

Tabel 1.1 Nilai Indeks SPBE

No.	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 - 5,0	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	<1,8	Kurang

Berdasarkan website SPBE (spbe.go.id), Pemerintah Kabupaten Kuningan sebagai salah satu kabupaten yang menerapkan SPBE di Indonesia memperoleh nilai indeks SPBE sebesar 2,11, yang mana jika dilihat pada tabel 1 Nilai Indeks SPBE, nilai tersebut termasuk ke dalam rentang 1,8 - < 2,6 yang berarti pemerintah kabupaten Kuningan memperoleh predikat cukup, jika dirincikan aspek yang sudah mencapai SPBE target yaitu pada layanan publik dan layanan adpem, sementara untuk kebijakan layanan, kelembagaan, strategi dan perencanaan, dan TIK masih dibawah aspek target.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk merancang *Enterprise Architecture Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik* (SPBE) yang di dalamnya termasuk pemetaan pengintegrasian data di dalam lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan menggunakan *best practice* TOGAF ADM dengan referensi lain yaitu DAMA DMBOK, berdasarkan *framework* Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. DAMA DMBOK digunakan untuk membantu dalam perancangan manajemen data, memberikan sebuah pendekatan model tata kelola khususnya pada data, dan secara umum memberikan artefak bagi perusahaan atau suatu organisasi sesuai kebutuhan (Prasetyo dan Surendro, 2013).

2. Dasar Teori/ Metodologi

2.1 Dasar Teori

2.1.1 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, SPBE merupakan sebuah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berguna untuk memberikan layanan terbaik kepada penggunaannya.

2.1.2 Enterprise Architecture (EA)

Menurut Jurnal (Haryono dkk., 2020), *Enterprise Architecture* berfokus pada penyelesaian masalah sebuah organisasi dengan tujuan untuk mendapatkan nilai yang diharapkan melalui investasi Teknologi Informasi atau TI. Dalam pembuatan Enterprise Architecture tentunya perlu diperhatikan untuk pemilihan kerangka berpikir atau biasa disebut *EA Framework*. Menurut CIO Council 2001 *Architecture framework* adalah alat atau *tool* yang dapat digunakan dalam mengembangkan cakupan luas dari arsitektur yang berbeda.

2.1.3 Manajemen Data pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Menurut Pasal 46 ayat 1 huruf c pada Peraturan Presiden Republik Indonesia tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Manajemen data mempunyai tujuan menjamin terwujudnya data yang terintegrasi, akurat, tersedia kapanpun untuk diakses, hal tersebut untuk dijadikan sebuah dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian untuk pembangunan nasional.

2.1.4 Satu Data Indonesia (SDI)

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia bahwa Data yang akurat, terpadu, mutakhir, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan diperlukan untuk mewujudkan suatu perencanaan, pelaksanaan,

evaluasi, dan pengendalian pembangunan, untuk semua itu maka diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh pemerintah melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI).

2.1.5 Penerapan Enterprise Architecture pada Pemerintahan

Instansi Pemerintahan Indonesia merupakan salah satu organisasi yang fokus utamanya adalah melakukan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menangani masalah dan menghadapi keluhan masyarakat lalu memberikan solusi yang sesuai. Namun pada pelaksanaannya semua proses bisnis yang dibutuhkan untuk menjalankan pelayanan tersebut memerlukan perencanaan yang matang. Sekarang ini pemerintah banyak menggunakan dan mengembangkan sistem informasi berbasis Teknologi Informasi (TI), tetapi pengembangannya masih belum sesuai dengan pemanfaatan framework pengembangan sistem informasi itu sendiri (Haryono dkk., 2020).

2.1.6 TOGAF Architecture Development (ADM)

Menurut Jurnal (Haryono dkk., 2020), TOGAF Architecture Development atau disingkat TOGAF ADM menjelaskan bagaimana membuat dan mengembangkan kerangka arsitektur, transisi, dan mengatur suatu realisasi arsitektur. Kegiatan di atas akan dilakukan secara berulang, sehingga sebuah perusahaan atau organisasi dapat melakukan perubahan secara terus-menerus dengan tujuan mencapai tujuan bisnis yang diinginkan. Namun dalam penelitian ini hanya mengambil domain System Information Architecture.

System Information architecture adalah fase perancangan arsitektur perusahaan yang membahas mengenai rancangan arsitektur sistem informasi berdasarkan dengan kebutuhan dari business architecture pada TOGAF ADM. Adapun fase ini terbagi menjadi dua perancangan yaitu perancangan data architecture dan application architecture (Haryono dkk., 2020).

2.1.7 Artefak

Artefak dalam TOGAF ADM bisa diartikan sebagai keluaran (*output*) yang dihasilkan selama proses perancangan arsitektur yang dilakukan dari fase ke fase. Artefak ini tidak bersifat kaku, yang artinya artefak yang ingin dihasilkan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan atau instansi pemerintah terkait, jadi artefak yang dihasilkan bersifat fleksibel atau bersifat "*not restricted*". Dalam artefak ini sendiri dikenal istilah Katalog, Matrik, dan Diagram sebagai jenis dari outputnya. (Group, 2018).

2.1.8 The DAMA Guide to The Data Management Body of Knowledge (DAMA DMBOK)

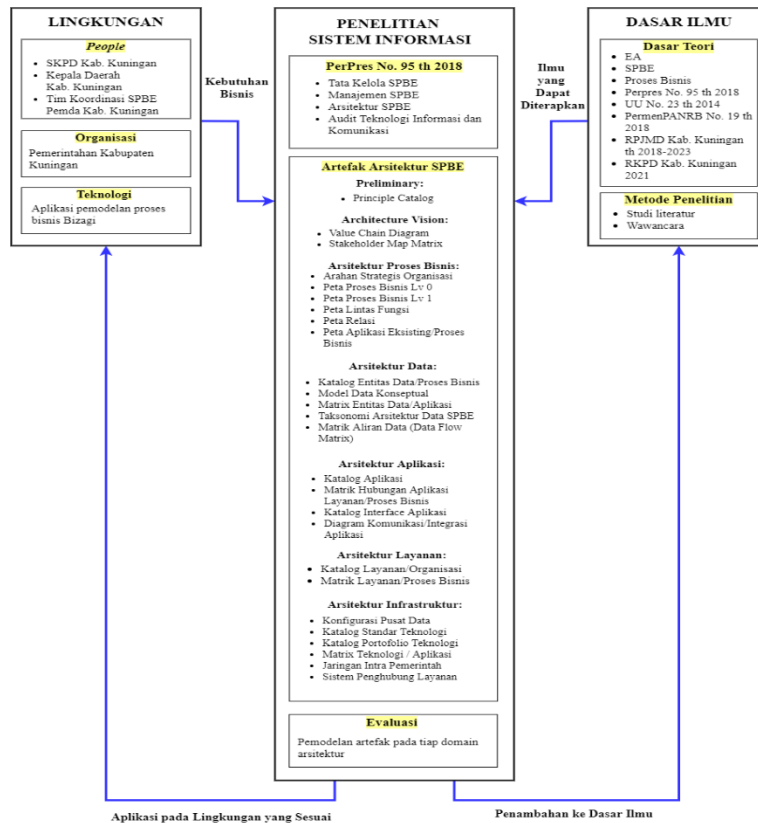
Menurut Prasetyo dan Surendro (2013) dalam jurnal (Nusantara, 2018) DAMA International memberikan sebuah pendekatan model tata kelola khususnya pada data secara umum, DAMA memberikan artefak bagi perusahaan atau suatu organisasi yang berguna untuk mengisi bagian sesuai kebutuhan.

2.1.9 Analisis Sentimen

Menurut Akbari dkk. (2012) dalam jurnal (Luqyana dkk., 2018) Analisis Sentimen adalah salah satu cabang ilmu dari *text mining*, *natural language program*, dan *artificial intelegence* yang dilakukan oleh analisis sentimen untuk mengekstrak, memahami, dan mengolah data secara otomatis sehingga informasi yang dihasilkan dari proses tersebut dapat bermanfaat

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan model konseptual. Model Konseptual adalah sebuah gambaran atau model yang berfungsi untuk menggambarkan elemen-elemen yang diperlukan untuk sebuah penelitian. Dengan adanya model konseptual ini diharapkan dapat memberi arahan yang jelas dan rinci pada bagian-bagian yang ada pada penelitian. Adapun pengambilan data dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data primer dan sekunder dengan menggunakan teknik wawancara dan studi pustaka. Pada elemen lingkungan terdiri atas tiga bagian yaitu people, organisasi, dan teknologi. Pada elemen penelitian sistem informasi terdapat tiga bagian yaitu Perpres No. 95 tahun 2018 sebagai acuan arsitektur SPBE, artefak arsitektur SPBE dan evaluasi artefak. Pada lingkungan dasar ilmu terdapat dasar teori dan metode penelitian. Berikut merupakan gambaran model konseptual pada penelitian ini:



Gambar 3.1 Model Konseptual

4. Pembahasan

Fokus Penelitian ini yaitu pada perancangan domain arsitektur data. Tahapan perancangan dimulai dari fase preliminary, architecture vision, arsitektur proses bisnis, dan arsitektur data. Berikut adalah hasil analisis dan perancangan EA SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.

4.1 Fase Preliminary

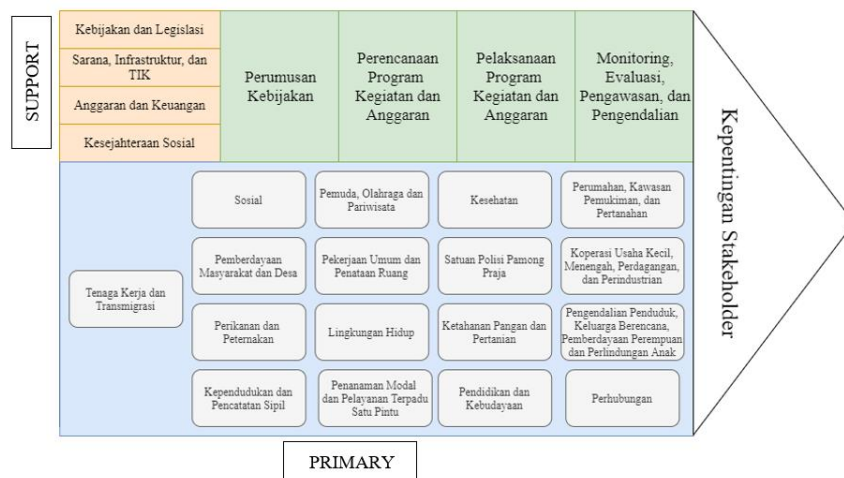
Fase Preliminary adalah fase pertama dari TOGAF yang didalamnya dilakukan proses persiapan dan inisiasi perancangan terkait kebutuhan bisnis untuk arsitektur. Adapun tujuan dibuatnya Preliminary Phase adalah penetapan kapabilitas arsitektur yang sesuai melalui prinsip-prinsip arsitektur pada instansi pemerintahan.

Gambar 4.1 Prinsip Data

No	Prinsip Data	Deskripsi
1	Aset Data	Data adalah aset yang memiliki nilai bagi perusahaan dan harus dikelola dengan baik.
2	Pembagian Data	Pengguna harus memiliki akses ke data yang diperlukan untuk melakukan tugasnya
3	Akses Data	Data harus dapat diakses oleh pengguna agar bisa menjalankan fungsinya.
4	Wali Data	Setiap elemen data memiliki wali yang bertanggung jawab atas kualitas data.
5	Standar Data	Data didefinisikan secara konsisten di seluruh sektor, dan definisinya dapat dimengerti dan tersedia untuk semua pengguna.
6	Transparansi Data	Data memiliki sifat transparansi yang baik dengan berbasis teknologi informasi.
7	Keamanan Data	Data terlindungi dari pengguna yang tidak memiliki otoritas dan pihak yang mengancam.

4.2 Fase Architecture Vision

Fase Architecture Vision adalah fase pertama dalam perancangan EA dalam TOGAF ADM Framework. Fase ini mendeskripsikan penentuan ruang lingkup, identifikasi pemangku kepentingan, dan membuat visi arsitektur. Adapun Artefak yang dihasilkan pada tahap ini adalah Stakeholder Map Matrix dan Value Chain.



Gambar 4.2 Value Chain

Tabel 4.1 Stakeholder Map Matrix

No	Stakeholder	Role	Class
1.	Bupati	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SPBE pada pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan	Key Player
2.	Wakil Bupati	Membantu bupati dalam pelaksanaan SPBE pada pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan	Key Player
3.	Sekretaris Daerah	Mengkoordinasikan penerapan kebijakan SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan serta mengkoordinasikan SPBE dengan instansi pusat dan Pemda	Key Player
4.	Inspektorat	Membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah serta pemerintahan desa	Keep Satisfied

5.2 Arsitektur Data

Data Architecture merupakan bagian dari fase Information System Architecture yang membahas mengenai arsitektur data dalam perancangan enterprise architecture pada organisasi (Haryono dkk., 2020). Artefak yang dihasilkan pada perancangan arsitektur data yaitu Katalog Entitas Data/ Proses bisnis, Katalog Aplikasi/ Entitas Data, Model Data Konseptual, taksonomi data, dan data flow matrix.

5.2.1 Katalog Entitas Data/ Fungsi

Katalog Entitas Data/ Proses Bisnis didapat dari analisis proses bisnis pada Bagian sasaran, program, dan lintas fungsi, yang selanjutnya dipetakan ke dalam diagram yang berisi seluruh entitas data yang dipakai dalam proses bisnis yang berjalan, pemangku kepentingan sebagai yang menjalankan proses bisnis tersebut, serta tipe data yang menjelaskan apakah data tersebut tergolong kepada master data atau transactional data.

Tabel 5.1 Katalog Entitas Data/ Proses Bisnis

No	Entitas Data	Proses Bisnis	Pemangku kepentingan	Deskripsi	Tipe Data
1.	Data Hukum dan Perundangan	Seluruh Proses Bisnis	Seluruh OPD pada Kabupaten Kuningan	Informasi tentang Hukum dan Perundangan yang berlaku	Master Data
2.	Data Program kerja	Seluruh Proses Bisnis	Seluruh OPD pada Kabupaten Kuningan	Informasi tentang Program Kerja Seluruh OPD	Master Data
3.	Data Kearsipan dan Persuratan	Seluruh Proses Bisnis	Seluruh OPD pada Kabupaten Kuningan	Informasi tentang masalah kearsipan dan Persuratan	Master Data

5.2.2 Katalog Aplikasi/ Entitas Data

Katalog Aplikasi/ Entitas Data menggambarkan usulan data yang akan digunakan untuk aplikasi yang sudah digunakan maupun aplikasi baru yang diusulkan yang mana datanya diambil dari data semua OPD, data spesifik usulan dipetakan dengan berdasarkan proses bisnis yang berjalan.

Tabel 5.2 Katalog Aplikasi/ Entitas data

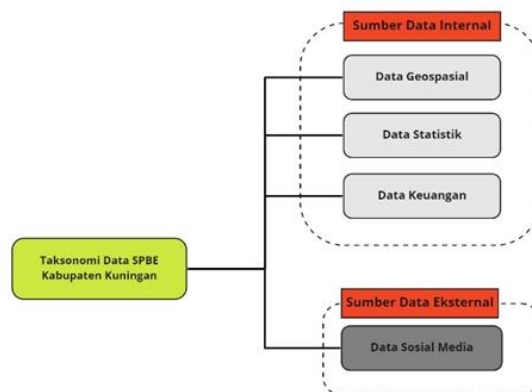
Aplikasi	Entitas Data
Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	Data RAPBD
	Data Komoditi Daerah
	Data Pembangunan Daerah
	Data Evaluasi dan Keberhasilan Program
SIMAK BMN	Data Keuangan
	Data Sarana Prasarana

5.2.3 Model Data Konseptual

Model Data Konseptual berfungsi untuk mengetahui data apa saja yang ada pada seluruh dinas, dimana di dalamnya terdapat data bersama semua OPD dan data spesifik yang merupakan data usulan serta ada data dari dinas lain yang berhubungan dengan dinas terkait yang didapat dari pemetaan proses bisnis.

5.2.4 Taksonomi Arsitektur Data

Taksonomi Arsitektur Data menunjukkan pengelompokkan data berdasarkan sumbernya yaitu sumber Internal dan sumber Eksternal sebagai sumber data utama yang dapat digunakan untuk SPBE Kabupaten Kuningan. Sumber data internal terdiri dari data statistik, data geospasial, dan data keuangan, hal ini sesuai dengan amanat yang terdapat pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 39 tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia. Sumber data eksternal berasal dari data sosial media.



Gambar 5.1 Taksonomi Data SPBE

5.2.5 Matrik Aliran Data (Data Flow Matrix)

Data Flows adalah jenis dokumentasi data yang menggambarkan bagaimana data bergerak melalui proses bisnis dan sistem. Aliran data mengalir dari ujung ke ujung menggambarkan darimana data berasal dan dipakai saat bergerak di dalam beragam proses bisnis. Diagram ini dapat membantu menjelaskan keadaan data pada titik tertentu dalam aliran data.



Gambar 5.2 Data Flow Matrix

5.2.6 Gap Analysis

Gap Analysis Data Architecture bertujuan untuk dapat melakukan pengukuran dengan tujuan mengetahui kesenjangan (gap) yang dapat mengevaluasi kebutuhan data target yang dapat dijadikan sebagai nahan pengembangan arsitektur kedepannya.

Tabel 5.3 Gap Analysis

No	Requirement	Fulfillment			Keterangan	Solusi
		N	P	F		
1	Data adalah aset yang memiliki nilai dan harus dikelola dengan baik.	√			Belum adanya pendokumentasian data yang lengkap	Diperlukan pendokumentasian entitas data
2	Arsitektur data mendukung prinsip Satu Data Indonesia		√		Belum adanya SOP untuk manajemen data sesuai amanah SPBE	Diperlukan pembuatan SOP langkah awal manajemen data
3	Entitas Data harus sesuai terhadap aplikasi target		√		Entitas data sudah cukup sesuai dengan aplikasi target	Pemetaan entitas data ke aplikasi target
4	Data harus dapat dibagipakaikan kepada seluruh pengguna sesuai tingkat otoritasnya.			√	Penggunaan data sesuai dengan otoritas yang dimiliki	
5	Data harus dapat dipertanggungjawabkan keasliannya		√		Belum adanya pendokumentasian data yang lengkap	Diperlukan pendokumentasian entitas data
6.	Data terintegrasi antar satu pengguna dan pengguna lainnya sesuai kebutuhan dengan tujuan menghindari redundansi data			√	Data sudah sesuai kebutuhan dikarenakan ada aplikasi integrasi	
7.	Arsitektur data Mendukung prinsip Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia		√		Sudah memiliki Web Satu Data Kabupaten Kuningan	Dibutuhkan peningkatan fitur-fitur pada Web agar penggunaan dapat maksimal

5. Kesimpulan

Penelitian ini menghasilkan rancangan Enterprise Architecture SPBE menggunakan kerangka kerja TOGAF ADM, dari fase pengembangan Preliminary Phase, Architecture Vision, dan Technology Architecture. Dengan mempertimbangkan analisa kebutuhan organisasi dari 5 (lima) domain utama pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yaitu bisnis, data, aplikasi, layanan dan infrastruktur dengan fokus domain data yang bertujuan untuk mendefinisikan standar operasional untuk menciptakan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi SPBE di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan.



REFERENSI

- [1] P. Indonesia, "Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah," Selasa Maret 2015. [Online]. Available: <https://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-kepala-lkpp/peraturan-kepala-lkpp-nomor-6-tahun-2015>.
- [2] M. Abid, S. Rahayu and W. Aminah, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal," *e-Proceeding of Management*, p. 753, 2018.
- [3] G. Olivia and T. Mahadi, "Belanja modal tumbuh lambat lima tahun terakhir, pemerintah diminta tambah pagu," Kamis Juni 2019. [Online]. Available: <https://nasional.kontan.co.id/news/belanja-modal-tumbuh-lambat-lima-tahun-terakhir-pemerintah-diminta-tambah-pagu>. [Accessed Jumat Maret 2021].
- [4] L. M. Kasdy, Nadirsyah and H. Fahlevi, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal Dan Implikasinya Pada Realisasi Belanja Modal Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Indonesia," *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 2018.
- [5] R. Anjaeni and W. T. Rahmawati, "Belanja modal pemerintah yang ditunda tahun 2020 mencapai Rp 493 miliar," Rabu Juni 2020. [Online]. Available: <https://nasional.kontan.co.id/news/belanja-modal-pemerintah-yang-ditunda-tahun-2020-mencapai-rp-493-miliar>. [Accessed Jumat Maret 2021].
- [6] P. Indonesia, "Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Keuangan Nomor 177/ KMK.07/2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional," Kamis April 2020. [Online]. Available: <https://kkp.go.id/djprl/jaskel/artikel/18646-keputusan-bersama-menteri-dalam-negeri-dan-menteri-keuangan-nomor-119-2813-sj-nomor-177-kmk-07-2020-tentang-percepatan-penyesuaian-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah-tahun-2020-dalam-rangka-penanganan-coron>. [Accessed Kamis September 2020].
- [7] P. Indonesia, "Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Daerah," Jumat Oktober 2004. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004>.
- [8] M. I. Azis, "Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara," *Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika*, pp. 1411-8637, 2020.
- [9] K. W. Jati, Subowo, W. Ilmiyana and M. P. Sari, "Pengaruh PAD, DAU Beban, dan Karyawan di Belanja Modal dengan Kepadatan Penduduk sebagai Variabel Moderating," *Jurnal Dinamika Akuntansi*, pp. 132-140, 2019.
- [10] P. Indonesia, "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah," Senin Mei 2006. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/126455/permendagri-no-13-tahun-2006>.
- [11] C. Angelina, Janice, C. Clarina, W. W. Fanjaya and Jesisca, "Pengaruh PE, PAD, DAU dan SiLPA terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara)," *Riset & JURNAL AKUNTANSI*, 2020.
- [12] R. D. Utami dan K. Julian, "Pengaruh Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak," *The Asia Pacific Journal of Management*, pp. Vol.4 No.1 ISSN: 2407-6325, 2017.
- [13] R. S. Putri dan S. Rahayu, "Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Jawa Barat," *JASa (Jurnal Akuntansi, Audit dan Sistem Informasi Akuntansi)*, pp. Vol.3 No.2 P-ISSN 2550-0732 / E-ISSN 2655-8319, 2019.
- [14] D. Sudaryono, "Statistik Deskriptif dan Inferensial," in *Metode Penelitian*, Depok, PT Rajagrafindo Persada, 2018, p. 348.
- [15] R. A. Purnomo, "Uji Asumsi Klasik Regresi," in *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis*, Ponorogo, CV.WADE GROUP, 2017, p. 107.
- [16] S. R. Ajija, D. W. Sari, R. H. Setianto and M. R. Primanti, "Uji Asumsi Klasik," in *Cara Cerdas Menguasai Eviews*, Jakarta, Salemba Empat, 2020, pp. 35-38.
- [17] D. L. Talluta, R. Lambelanova and E. Wargadinata, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Silpa Terhadap Belanja Modal Dan Dampaknya Kepada Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Daerah Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur," *Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, pp. 43-66, 2018.
- [18] K. K. Bolen, "The effect of financial performance and balanced funds on capital expenditure of local government in district/city in Indonesia," *Journal of public administration and governance*, 2019.